

**ASLI**

JUR. EK. PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

29-07-2023

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PRODUK  
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN JUMLAH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PNS) TERHADAP *FISCAL STRESS* DI PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**



**Skripsi Oleh:**

**ATIKOH AZMI**

**01021381924138**

**Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PALEMBANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Kalimantan Barat**

Disusun oleh:

Nama : Atikoh Azmi  
Nim : 01021381924138  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 26 Juni 2023



Dr. Hj. Anna Yulhanita, S.E., M.Si.  
NIP: 197007162008012015

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Kalimantan Barat**

**Disusun Oleh :**

**Nama** : Atikoh Azmi  
**Nim** : 01021381924138  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Jurusan** : Ekonomi Pembangunan  
**Konsentrasi** : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 Juli 2023 dan telah memenuhi syara untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 18 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji

Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP.197007162008012015

Dr. Muhammad Subardin, S.E., M.Si  
NIP.197110302006041001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-7-2023  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
Nip.197304062010121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Atikoh Azmi  
Nim : 01021381924138  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Kalimantan Barat

Pembimbing : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si.

Tanggal Ujian : 17 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaa.

Palembang, 18 Juli 2023  
Pembuat Pernyataan,

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-07-2023  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI  
  
METERAI TEMPEL  
67AAKX514379187 Atikoh Azmi

NIM. 01021381924138

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Kalimantan Barat” sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta melihat pengaruhnya terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Kalimantan Barat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 17 Juli 2023



Atikoh Azmi  
NIM. 01021381924138

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan ilmu-ilmunya untuk dapat membimbing serta memberikan saran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Subardin, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kedua orang tua Almarhumah ibu dan Almarhum ayah saya yang sangat hebat sehingga dapat mendidik saya untuk tidak pantang menyerah disetiap impian yang sedang saya perjuangkan.
5. Sahabat saya Via Andini, Ananda Heryni, Desty Muliani dan Rani Eka Lestari serta teman-teman selama perkuliahan yang sudah banyak memberikan dukungan dan motivasi sampai dengan terselesikannya skripsi ini.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, 17 Juli 2023



Atikoh Azmi

Nim. 01021381924138

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TERHADAP *FISCAL STRESS* DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

**Atikoh Azmi; Anna Yulianita**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap *fiscal stress* di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dari tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), Satu Data Provinsi Kalimantan Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017-2021.

**Kata Kunci :** *Fiscal Stress, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).*

Mengetahui

Ketua

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP.197007162008012015



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

## ABSTRACT

### ***ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL ORIGINAL INCOME (PAD), GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GDP) AND THE NUMBER OF CIVIL SERVANTS (PNS) ON FISCAL STRESS IN WEST KALIMANTAN PROVINCE***

**By:**

**Atikoh Azmi; Anna Yulianita**

*This study aims to analyze the effect of Regional Original Income (PAD), Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the number of Civil Servants (PNS) on fiscal stress in West Kalimantan Province in 2017-2021. The data used in this study is secondary data in the form of panel data from 2017-2021 sourced from the Central Statistics Agency (BPS), Directorate General of Financial Balance (DJPB), One Data West Kalimantan Province. The method in this study uses a quantitative approach with panel data regression analysis techniques. The results of this study show that the variable Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a positive effect on fiscal stress, while the variable Regional Original Income (PAD) and the variable number of Civil Servants (PNS) have a negative effect on fiscal stress in West Kalimantan Province in 2017-2021.*

***Keywords: Fiscal Stress, Local Original Income (PAD), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Number of Civil Servant (PNS).***

Acknowledge by,

Chairman

Head of Development Economics Department



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP.197007162008012015




Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Atikoh Azmi
	NIM	01021381924138
	Tempat, Tanggal Lahir	Banjarnegara, 29 April 2000
	Alamat	Jalan A. Yani, Kompleks Yaktapena II, Blok III. No. 27 Kota Palembang
	Nomor Handphone	081274254123
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi	155 cm	
Berat Badan	43 kg	
Email	<a href="mailto:atikahazmi071@gmail.com">atikahazmi071@gmail.com</a>	
<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
2007 – 2013	SD Negeri Batik Karya Yogyakarta	
2013 – 2016	SMP Negeri 16 Palembang	
2016 – 2019	SMA Muhammadiyah 1 Palembang	
2019 – 2023	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya	
<b>RIWAYAT ORGANISASI</b>		
2020 – 2021	Sekretaris Umum Komunitas Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	

2020 - 2021	Sekretaris Departemen Komunitas Edukasi Ilmiah (KEIMI) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2021 - 2022	Kepala Divisi Kemuslimahan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF Ukhuwah) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2021 - 2022	Student Chapter Perwakilan Sumatera Selatan Melek APBN Indonesia
2021 - 2022	Asisten Laboratorium Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2022 - 2023	Sekretaris Kementerian Pembedayaan Masyarakat Palembang (PEMPAL) BEM KM Universitas Sriwijaya
<b>PENGALAMAN PELATIHAN</b>	
2020	Pelatihan Pasar Modal dan Investasi, Komunitas Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2020	Pelatihan Personal Branding Yang Diselenggarakan Oleh Indonesia Youthquake dan PPI Belanda
2021	Pelatihan <i>Investment</i> Yang Diselenggarakan Oleh Indonesia Youthquake dan PPI Belanda
2021	Pelatihan Pada Program Bank Indonesia Mengajar Diselenggarakan Oleh Universitas Sriwijaya
2022	Pelatihan Analisis Fundamental dan Teknikal Serta Peran PT KSEI Dalam Mewujudkan Kenyamanan dan Perlindungan Investasi di Pasar Modal Indonesia
2022	Pelatihan Peluang dan Resiko di Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
<b>PRESTASI KEGIATAN</b>	

2020	Finalis 6 Besar Lomba <i>Essay</i> ED. FAIR Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2020	Delegasi <i>Fully Funded</i> Nice Abi Bangka Belitung
2021	Delegasi Terpilih <i>Internasional Youth Summit and Conference</i> Thailand
2022	Peserta Terpilih Program Mahasiswa Magang Bersertifikat PERUM BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Yang Diselenggarakan Oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Penerimaan Pemerintah.....	10
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	11
2.2. Definisi dan Konsep .....	16
2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	16
2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	17
2.2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	18
2.2.4. Tekanan Fiskal ( <i>Fiscal Stress</i> ).....	19
2.2.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	20
2.2.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	20
2.2.7. Pengaruh Jumlah Pegawai Negeri Sipil Terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	21
2.3. Penelitian Terdahulu.....	22
2.4. Kerangka Pemikiran .....	27

2.5. Hipotesis Penelitian .....	28
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	29
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	29
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	30
3.4.1. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.....	30
3.5. Teknik Analisis Data .....	34
3.5.1. Analisis Regresi Data Panel.....	35
3.5.2. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel .....	36
3.5.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	37
3.6. Pengujian Secara Statistik.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
4.1. Hasil Penelitian .....	42
4.1.1. Gambaran Umum Kalimantan Barat.....	42
4.1.2. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat .....	43
4.1.3. Kondisi Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kalimantan Barat .....	46
4.1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kalimantan Barat .....	48
4.1.4. Kondisi <i>Fiscal Stress</i> di Kalimantan Barat .....	50
4.1.5. Estimasi Model Regresi Data Panel .....	52
4.1.6. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	54
4.1.6. Estimasi Data Panel Pendekatan <i>Random Effect Model</i> .....	56
4.1.8. Pengujian Secara Statistik.....	58
4.2. Pembahasan.....	60
4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap <i>Fiscal Stress</i> di Provinsi Kalimantan Barat.....	60
4.2.2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap <i>Fiscal Stress</i> Provinsi Kalimantan Barat.....	61
4.2.3. Pengaruh Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap <i>Fiscal Stress</i> di Provinsi Kalimantan Barat.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	63
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Teori Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman.....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	27
Gambar 4.1. Peta Provinsi Kalimantan Barat.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (dalam miliar) .....	3
Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat .....	5
Tabel 1.3. Realisasi PAD, PDRB, Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 .....	7
Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 .....	44
Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 di Provinsi Kalimantan Barat (dalam persen) .....	47
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.....	50
Tabel 4.4. Kondisi <i>Fiscal Stress</i> Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.....	52
Tabel 4.5. Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	53
Tabel 4.6. Hasil <i>Chow Test</i> .....	54
Tabel 4.7. Hasil <i>Hausman Test</i> .....	55
Tabel 4.8. Hasil LM-Test .....	56
Tabel 4.9. Hasil Estimasi Pendekatan <i>Random Effect Model</i> .....	56
Tabel 4.10. Hasil Uji-F .....	58
Tabel 4.11. Hasil Uji-t .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	69
Lampiran 1 Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	70
Lampiran 2 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2021 .....	71
Lampiran 3 Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2017-2021 .....	72
Lampiran 4 Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017-2021 .....	74
Lampiran 5 Data <i>Fiscal Stress</i> Tahun 2017-2021 .....	75
Lampiran 6 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 .....	76
Lampiran 7 Data Realisasi PAD, PDRB, Jumlah PNS Tahun 2017-2021 .....	76
Lampiran Hasil Estimasi Pendekatan <i>Common Effect</i> Model (CEM).....	77
Lampiran Hasil Estimasi Pendekatan <i>Fixed Effect</i> Model (FEM) .....	78
Lampiran Hasil Estimasi Pendekatan <i>Random Effect</i> Model (REM).....	79
Lampiran Hasil Uji <i>Chow Test</i> .....	80
Lampiran Hasil Uji LM Test .....	81
Lampiran Hasil <i>Hausman Test</i> .....	82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan sentralisasi yang ada di Indonesia dapat menyebabkan permasalahan, salah satu permasalahan adalah masalah pembangunan di daerah. Dengan adanya berlakunya sistem pembangunan terpusat, banyak peluang bagi daerah, baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena masalah ini, masyarakat menuntut perubahan mendasar dalam sistem manajemen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan daerah yang ada (Sjafrizal, 2014).

Pada dasarnya di Indonesia, sistem otonomi daerah sudah berlangsung selama 21 tahun sejak pertama kali diimplementasikan pada 1 Januari 2001. Namun, sebelum otonomi daerah resmi diterapkan, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah. Sejak diundangkannya, sistem pemerintahan dan pembangunan negara sudah memasuki era baru dari sistem pembangunan yang sentralistik atau terpusat ke era otonomi daerah. Namun hingga saat ini telah terjadi perubahan terhadap undang-undang yang berlaku tersebut, diantaranya undang-undang no. 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, kotamadya diposisikan sebagai memegang peran penting dalam implementasi kebijakan dan pembangunan perekonomian (Prihatiningsih, 2010).

Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesejahteraan sosial suatu masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Permasalahan pertumbuhan perekonomian telah menarik perhatian para ekonom sejak zaman Adam Smith hingga ekonom modern, khususnya permasalahan pertumbuhan perekonomian di berbagai negara berkembang, salah satunya adalah permasalahan pertumbuhan perekonomian di negara berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kuat belum tentu mencerminkan kemakmuran rakyat Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat, namun dampak eksploitasi tenaga kerja terhadap masyarakat masih sangat kecil. Kajian Adi (2011) yang menyatakan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia hanya menyerap 250 ribu tenaga kerja baru (Adi, 2011).

Otonomi daerah adalah ketentuan yang meliputi hak, wewenang, dan tugas yang diberikan oleh negara kepada daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi pemerintahan daerah, mereka dapat memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mengembangkan potensi daerah yang ada. Halim (2004) menyatakan bahwa ciri-ciri terpenting yang menunjukkan bahwa suatu daerah dapat menjalankan otonomi daerah adalah kemampuan ekonomi daerah tersebut. Kemampuan daerah otonom untuk mengelola perekonomiannya sendiri dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, APBD merupakan instrumen politik dasar pemerintah daerah (Assyurriani, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah distujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering terjadi keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus pemerintah pusat sudah menghibau disetiap akhir tahun anggaran terhadap terhadap pembangunan pada tahun berikutnya terhambat dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal maka akan berdampak buruk juga pada realisasi pembangunan di daerah.

Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (dalam miliar)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (dalam miliar)						
Tahun	Anggaran/Pagu			Realisasi		
	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2017	5.095,40	5.065,40	30,00	5.389,20	5.259,79	129,41
2018	5.308,16	5.432,29	-124,13	5.660,06	5.341,40	318,65
2019	5.760,67	5.910,67	-150,00	5.939,75	5.677,40	262,36
2020	6.332,88	6.582,88	-250,00	5.665,11	5.879,36	-214,24
2021	6.680,49	7.035,49	-355,00	6.431,29	6.303,15	128,14

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023

Pada Tabel 1.1. di atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021 untuk sisi anggaran hanya di tahun

2017 yang mengalami surplus anggaran yaitu sebesar 30,00 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang mengalami defisit anggaran yang terus meningkat signifikan setiap tahunnya. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat 2017-2021 tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar -355,00 miliar dan defisit anggaran terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar -124,13 miliar. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021 pada sisi realisasi hanya di tahun 2020 yang mengalami defisit anggaran sebesar -214,24 miliar dibandingkan dengan 4 (empat) tahun lainnya yang mengalami surplus anggaran. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat 2017-2021 tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 318,65 miliar dan surplus anggaran terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 128,14 miliar.

Kehadiran desentralisasi tentunya menambah perbedaan keuangan publik, melihat bahwa setiap daerah memiliki kesiapan dan kemampuan yang sangat berbeda-beda dalam hal sumber daya dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa daerah tergolong sebagai sumber pendapatan potensial, seperti pendapatan dari pajak, retribusi daerah, dan dana yang cukup untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan atau penerimaan daerah. Di sisi lain, otonomi dapat mendorong upaya swasembada daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pajak daerah yang lebih tinggi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Konsekuensinya, tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang tinggi akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang Sah lainnya. Menurunnya dari suatu kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga dapat mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menyebabkan daerah tersebut bergantung pada neraca anggaran sehingga menimbulkan gejala krisis keuangan.

Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (dalam persen)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan (dalam persen)		
Provinsi	Tahun	Realisasi PAD
Kalimantan Barat	2019	80,42
Kalimantan Selatan	2019	78,58
Kalimantan Timur	2019	69,93
Kalimantan Tengah	2019	15,23

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Tahun 2019

Pada Tabel 1.2 menunjukkan di tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat, pada November Triwulan III, 2019 Provinsi Kalimantan Barat realisasi terhadap PAD hanya sebesar 80.42 persen menurun dibandingkan pada Triwulan III 2018. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan Selatan tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 78,58 persen. Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Tengah yang mengalami

peningkatan dari triwulan sebelumnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur sebesar 69,93 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 15,23 persen. Kondisi yang membuat Provinsi Kalimantan Barat mengalami pelambatan dikarenakan perlambatan permintaan domestik.

Dengan otonomi daerah, diasumsikan bahwa daerah otonom lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada penyelenggaraan negara dalam membiayai dan mengelola perekonomian daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Pengelolaan ekonomi suatu daerah yang baik dapat diukur dari besar kecilnya pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan asli daerah yang dihimpun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah, semakin besar juga dana yang tersedia untuk dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang ada.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah berhasil mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber pendapatan daerah yang ada. Namun saat pelaksanaan otonomi daerah, nyatanya masih ada permasalahan yang ada, yakni. porsi dana transfer lebih besar dari pendapatan awal daerah. Semakin tinggi porsi dana transfer dalam jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan ketergantungan daerah otonom terhadap pemerintah pusat juga semakin tinggi. Namun kenyataannya tidak semua daerah dapat memanfaatkan bantuan negara, karena tingkat kebutuhan antar daerah

tidak sama. Oleh karena itu, pemerintah mentransfer uang dalam bentuk dana perimbangan (Christy dan Adi, 2009).

Tabel 1.3. Realisasi PAD, PDRB, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (dalam ribu rupiah)

Realisasi PAD, PDRB, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (dalam ribu rupiah)					
No	Tahun	Variabel			
		PAD	PDRB	PNS	<i>Fiscal Stress</i>
1	2017	184.509.651,09	177.493.653,83	11.263	12.428.905
2	2018	56.600.586,14	194.138.220,75	10.845	13.059.621
3	2019	59.397.531,57	212.150.332,22	10.882	13.724.297
4	2020	63.328.798,12	214.001.753,68	10.463	13.474.327
5	2021	64.315.471,44	231.321.163,28	10.447	14.118.693

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat

Dari Tabel 1.3 di atas menunjukkan pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat mencapai realisasi tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 18.509.651,09. Sedangkan pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar Rp 56.600.586,14. Penurunan tersebut tergolong sangat signifikan. Namun pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan sebesar Rp 64.315.471,44. Pada tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Barat mencapai realisasi tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 231.321.163,28. Sedangkan pada tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar Rp 177.493.653,83. Penurunan tersebut tergolong sangat signifikan.

Namun pada tahun 2018 PDRB Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan sebesar Rp 194.138.220,75.

Sedangkan untuk Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2017 Provinsi Kalimantan Barat mencapai realisasi tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar 11.263 orang. Sedangkan pada Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 10.447 orang. Penurunan tersebut tergolong cukup signifikan. Pada tahun 2021 *fiscal stress* Provinsi Kalimantan Barat mencapai realisasi tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp14.118.693. Sedangkan pada tahun 2017 *fiscal stress* Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar Rp 12.428.905. Penurunan tersebut tergolong cukup signifikan. Namun pada tahun 2018 *fiscal stress* Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan sebesar Rp 13.059.621.

Mengingat bahwa setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam hal potensi sumber daya dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, desentralisasi tidak diragukan lagi akan mendorong ketimpangan fiskal. Beberapa daerah disebut "daerah beruntung" karena mempunyai sumber pendapatan potensial seperti sumber pendapatan dari pajak, pembayaran tanah, dan sumber daya yang cukup untuk dioptimalkan. Akibatnya, suatu daerah dapat menanggung tekanan keuangan yang lebih besar dari pada sebelum era otonomi.



### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, pertanyaan dari penelitian yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017-2021?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

Manfaat Teoritis:

1. Untuk memperdalam dan memahami Teori Penerimaan Pemerintah serta Teori Pengeluaran Pemerintah pada konsentrasi keuangan daerah
2. Sebagai proses pembelajaran berpikir dan menganalisa dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Manfaat Praktis:

1. Membantu instansi pemerintah melalui rekomendasi kebijakan guna bisa mengatasi masalah tekanan anggaran (*fiscal stress*)
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki lingkup penelitian yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta.*
- Adriana, M., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2017). Variabel yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 25(2).
- Agus, E., & Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50.
- Alegre, J. G. (2010). *Decentralization and The Composition of Public Expenditure in Spain. Regional Studies*, 44(8), 1067–1083.
- Arif, M., & Arza, F. I. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi*, 9(2), 21–36. Retrieved from.
- Arnett, S. (2011). *Fiscal Stress in the U . S . States : an Analysis of Measures and Responses Copyright 2011 By Sarah Arnett Fiscal Stress in the U . S . States : an Analysis of. Retrieved from.*
- Assyurriani, R. (2015). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2013. *Jurnal Akuntansi*, 2–20.
- Azwardi et al. (2020). Modul 3: Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. *Unsri Press: Palembang.*
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. *Depok : PT Rajagrafindo Persada.*
- Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *Paper The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya*, Hal 1-16.
- Delima, N. A., & Marwa, T. (2016). Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 69–78.

- Grisorio, M. J., & Prota, F. (2015). *The Impact of Fiscal Decentralization on The Composition of Public Expenditure: Panel Data Evidence from Italy. Regional Studies*, 49(12), 1.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.*
- Hevesi, A. G. (2006). *Analysis of Fiscal Stress in New York State's Cities. Local Government Issues in Focus*, 2(1), 1–20.
- Huda, A. S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, *Fiscal Stress* dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. *JASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 5(2), Hal 151-166.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713.
- Jia, J., Guo, Q., & Zhang, J. (2014). *Fiscal Decentralization and Local Expenditure Policy in China. China Economic Review*, 28, 107–122. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.01.002>.
- Kwon, O. (2003). *The Effects of Fiscal Decentralization on Public Spending: The Korean Case. Public Budgeting and Finance*, 23(4), 1–20. <https://doi.org/10.1111/j.0275-1100.2003.02304001>.
- Manafe, M. W. N., Ena, Z., & Adu, S. S. (2019). *Fiscal Stress : Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wahana*, 21(2), 125–135. <https://doi.org/10.35591/whn.v21i2.152>.
- Mangkoesoebroto, G. (2017). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga. BPFE: Yogyakarta.*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.*
- Muda, I. (2015). Variabel Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. (Februari). <https://doi.org/10.13140/2.1.3934.2880>.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 27 Tahun 2013 tentang. (n.d.). *Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah.*
- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4(1), 25–36.

- Prihatiningsih, A. (2010). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta. *Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. *Depok: Rajawali Pers.*
- Rizkiano, A. (2011). Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2004-2008 Di Kota Salatiga. *Skripsi, Universitas Diponegoro.*
- Rusydi, B. (2010). *Deteksi Ilusi Fiskal ( Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008 )*. 1–118.
- Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 23–34.
- Sejati, T. P. (2013). Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (studi pada Provinsi jawa timur 2007-2009). *Artikel Ilmiah, STIE Perbanas Surabaya.*
- Setiawina, N. D. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104–112.
- Setyawan, B., & Adi, P. H. (2008). Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal. *Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana*, 1–12.
- Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). *State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(1), 40–61. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-16-01-2004-b003>.
- Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.
- Sugiyono, P. D. (2018). Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. *Bandung: CV Alfabeta.*
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vo. 1 No.*, Hal 109-124.

